V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB)

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk Membantu Gubernur dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Entitas berkedudukan di Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) mempunyai tugas dan fungsi Membantu Gubernur dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) berkomitmen dengan visi “Membantu Gubernur dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022.”

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kepada Kementerian negara/Lembaga;
- Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus;
- Meningkatnya perlindungan khusus anakkepentingan;
- Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

Pendahuluan

A.2. Pendahuluan

Paket Undang-undang regulasi pengelolaan keuangan beserta turunannya membawa atmosfir baru terhadap tata kelola keuangan pemerintah dengan berbagai penyempurnaan-penyempurnaannya, ini semua untuk memenuhi keinginan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah yang dapat diterima secara umum. Adanya pergeseran-pergeseran terhadap penerapan fungsi-fungsi pengelolaan serta penatausahaan keuangan daerah semula bersifat sentralistik menjadi desentralisasi, yang artinya bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas pelaporan berkewajiban untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, efisiensi dan transparansi dengan melaporkan secara periodik dan berjenjang.

Selain itu laporan keuangan merupakan potret realisasi atas anggaran pendapatan dan belanja pada setiap SKPD pada tahun berkenaan, tercermin dalam tabel perangkaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Namun demikian untuk memudahkan pengungkapan secara naratif atas pergerakan angka tersebut diatas maka dapat dipahami melalui catatan atas laporan keuangan.

Maksud dan Tujuan

A.2.1. Maksud dan Tujuan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan maksud dan tujuan dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

a). Menyajikan informasi tentang kebijakan keuangan dan pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

b). Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

c). Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d). Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

e). Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

f). Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Dasar Hukum

A.2.2. Dasar Hukum

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan maksud dan tujuan dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

1). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
2). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
5). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
12). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13). Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 48) dan Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 68);

14). Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;

15). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;

16). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;

17). Peraturan Gubernur Banten Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;

18). Peraturan Gubernur Banten Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;

19). Keputusan Kepala DPKAD Nomor 915/169-SK.PPKD/I/2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SiMDA) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

SiMDA terdiri dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah(SiMDA-BMD). SiMDA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SiMDA-BMD adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) adalah sebagai berikut:

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB). Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- Akuntansi Belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai signifikan.

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kas tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersembahkan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pituang Jangka Panjang

Pituang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimilki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable), Utang Bunga (Accrued Interest), Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities), Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan dan yang diperjualbelikan, Perubahan Valuta Asing.

b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi pada penjelasan tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	0,5%
Kurang Lancar	Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Peraturan Gubernur Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dalam penjelasan tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi pada Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Daerah. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik	4 tahun

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian aakun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Rp0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 December 2017 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 00,00% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan dinas tidak mengelola pendapatan.

Realisasi Belanja Rp27.121.330.720

BELANJA OPERASI

Realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) pada TA 2017 adalah sebesar Rp27.121.330.720 atau 91,98 persen dari anggaran senilai Rp29.487.049.800. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	11.485.000.000	11.042.999.816	96,15
Belanja Barang	16.307.846.000	14.619.708.454	89,65
Belanja Modal	1.694.203.800	1.458.622.450	86,09
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Netto	***29.487.049.800***	***27.121.330.720***	***91,98***
Pengembalian Belanja		***2.450.000***	***0,00***
Belanja Bruto	***29.487.049.800***	***27.123.780.720***	***91,99***

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

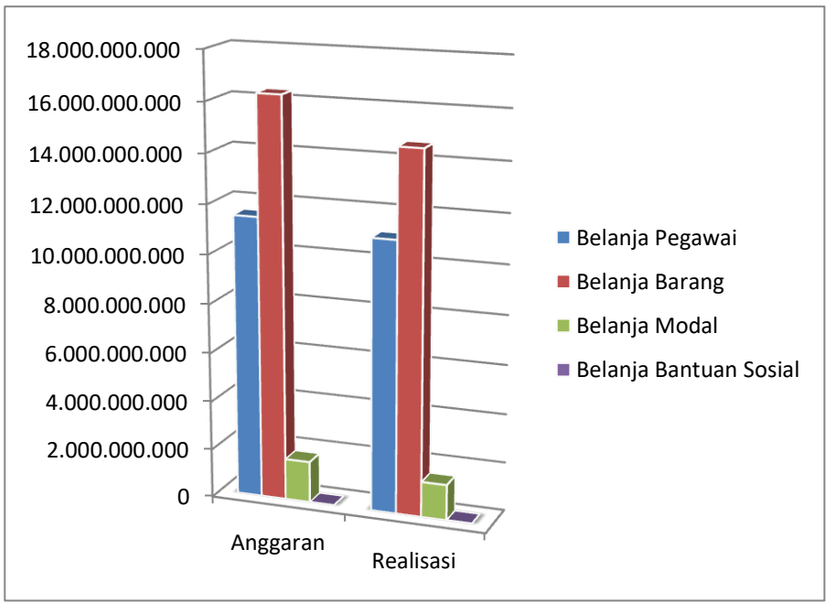

Dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 91,98 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Komposisi realisasi tahun 2017 dan realisasi tahun 2016 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

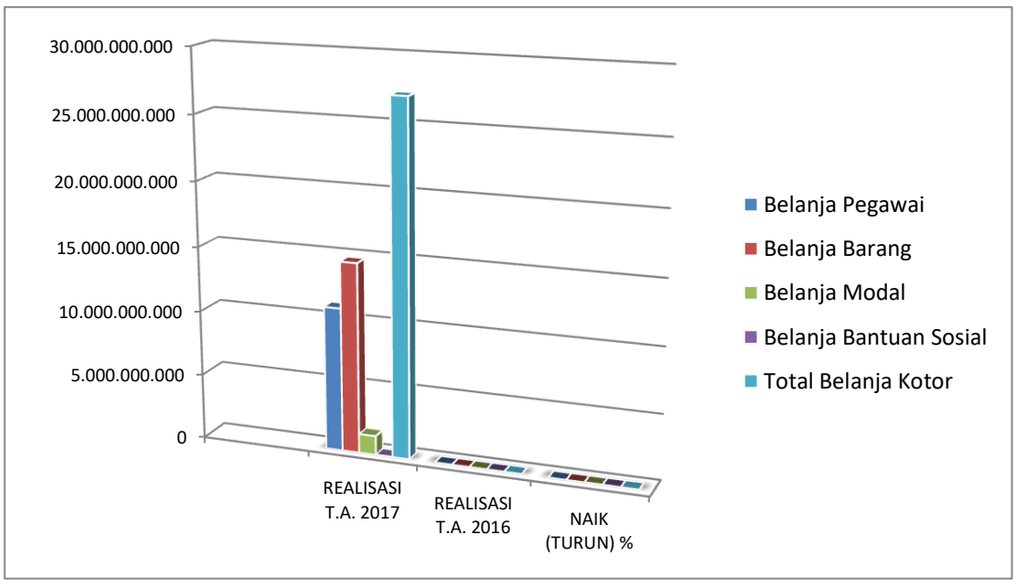

Dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,00 dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	11.042.999.816	0	0,00
Belanja Barang	14.619.708.454	0	0,00
Belanja Modal	1.458.622.450	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	**27.121.330.720**	**0**	**0,00**

Belanja Pegawai Rp11.042.999.816

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) pada TA 2017 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp11.042.999.816 dan Rp0 Berdasarkan Tabel 9, realisasi belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dari realisasi belanja TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan Tambahan Penghasilan bagi PNS

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.967.092.900	0	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga	264.276.254	0	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan	234.670.000	0	0,00
Belanja Tunjangan Umum	107.895.000	0	0,00
Belanja Tunjangan Beras	171.128.460	0	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.970.576	0	0,00
Belanja Pembulatan Gaji	39.017	0	0,00
Belanja Iuran BPJS Kesehatan	85.928.725	0	0,00
Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	11.366.278	0	0,00
Belanja TP Berdasarkan Beban Kerja	7.181.932.606	0	0,00
Belanja TP Berdasarkan Kondisi Kerja	16.500.000	0	0,00
Belanja Tunj. Profesi Guru	0	0	0,00
Belanja Tunj. Tambahan Penghasilan Guru PNS	0	0	0,00
Belanja Uang Honor Tetap	0	0	0,00
Belanja Vakasi	0	0	0,00
Belanja Uang Lembur	0	0	0,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***11.043.799.816***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*800.000*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***11.042.999.816***	***0***	***0,00***

Belanja Barang Rp14.619.708.454

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp14.619.708.454 dan Rp0.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan 0,00 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang operasional yang cukup signifikan di samping menurunnya biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas sepanjang tahun 2017.

Dapat kami jelaskan bahwa pada Belanja Barang Operasional terdapat Belanja Hadiah Prestasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa sebesar Rp121.000.000,00 serta Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp151.000.000,00.

Perbandingan Belanja Barang 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	6.260.212.890	0	0,00
Belanja Barang Non Operasional	2.059.593.000	0	0,00
Belanja Jasa	5.171.099.500	0	0,00
Belanja Pemeliharaan	7.700.000	0	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.122.753.064	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***14.621.358.454***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*1.650.000*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***14.619.708.454***	***0***	***0,00***

Belanja Hibah Rp0

B.4 *Belanja Hibah*

Realisasi Belanja Hibah TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Hibah TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Hibah TA 2016. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima hibah dalam rangka pemberdayaan untuk mendukung rencana kerja strategis.

Perbandingan Belanja Hibah 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	Naik (Turun) %
	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***0***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***0***	***0***	***0,00***

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.5 *Belanja Bantuan Sosial*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima bantuan sosial dalam rangka pemberdayaan sosial untuk mendukung rencana kerja strategis.

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	Naik (Turun) %
	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***0***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***0***	***0***	***0,00***

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah Rp0

B.6 *Belanja Modal Tanah*

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***0***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***0***	***0***	***0,00***

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.458.622.450

B.7 *Belanja Modal Peralatan dan Mesin*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.458.622.450 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami Kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan oleh penambahan gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	Naik (Turun)
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	502.600.000	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	86.100.000	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	29.076.000	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	106.480.000	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.480.000	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	46.300.000	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Server Komputer	168.520.000	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	270.719.950	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	106.000.000	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	117.346.500	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***1.458.622.450***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***1.458.622.450***	***0***	***0,00***

Belanja Modal Gedung dan

B.8 *Belanja Modal Gedung dan Bangunan*

Gedung dan Bangunan Rp0

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan oleh penambahan tiga ruang kelas di sisi kanan bangunan yang telah ada dan ruang kelas tersebut digunakan untuk kegiatan pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	Naik (Turun) %
	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***0***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***0***	***0***	***0,00***

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0

B.9 *Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan*

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan oleh penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***0***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***0***	***0***	***0,00***

Belanja Modal Lainnya Rp0

B.10 *Belanja Modal Lainnya*

Realisasi Belanja Lainnya TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan oleh pengadaan software untuk implementasi akuntansi pendapatan berbasis akrual.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	Naik (Turun) %
Software	0	0	0,00
Program Komputer	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***0***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***0***	***0***	***0,00***

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 December 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Bend Peng DP3AKKB Prov Banten 0801000672	Rp -	Rp -
2	Uang Tunai	Rp -	Rp -
Jumlah		0	0

Kas di Bendahara Penerima Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 December 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Jenis	Tahun 2017	Tahun 2016
1	-	Rp -	Rp -
2	Uang Tunai	Rp -	Rp -
Jumlah		**Rp -**	**Rp -**

Kas di BLUD Rp0

C.3 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per tanggal 31 December 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas di BLUD merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian sumber Kas di BLUD pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di BLUD

Jenis	Tahun 2017	Tahun 2016
	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas Lainnya Rp0

C.4 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per tanggal 31 December 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Rincian Kas Lainnya disajikan sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Setara Kas Rp0

C.5 Setara Kas

Saldo Setara Kas per tanggal 31 December 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. pada tanggal pelaporan. Rincian Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar (TP/TGR)

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1		-	-
2		-	-
Jumlah		**-**	**-**

Bagian Lancar TPA Rp0

C.6 Investasi Jangka Pendek

Saldo Investasi Jangka Pendek per tanggal 31 December 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Investasi Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1		-	-
2		-	-
Jumlah		**-**	**-**

Piutang Pendapatan Rp0

C.7 Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 December 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Piutang Pendapatan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Piutang Pendapatan

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
Total				**-**

Piutang Lainnya Rp0

C.8 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 December 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Piutang Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Piutang Lainnya

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
Total				-

Penyisihan Piutang Rp0

C.9 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 December 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Penyisihan Piutang pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
Total				-

Beban Dibayar di Muka Rp0

C.10 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 December 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
Total				-

Persediaan Rp0

C.11 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 December 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp20.490.500 dan Rp0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 December 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	Tahun 2017	Tahun 2016
Alat Tulis Kantor	8.322.000	-
Alat Listrik dan Elektronik	2.350.000	-
Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	114.000	-
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.190.000	-
Barang Cetakan	7.514.500	-
Jumlah	**20.490.500**	-

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rp0

C.12 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 December 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. .

Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 December 2017 adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya Rp0

C.13 Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya

Saldo Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya per 31 December 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya per 31 December 2017 adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi Dalam Obligasi Rp0

C.14 Investasi Dalam Obligasi

Saldo Investasi Dalam Obligasi per 31 December 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Investasi Dalam Obligasi adalah sebagai berikut:

Investasi Dalam Obligasi

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi dalam Proyek Pembangunan Rp0

C.15 Investasi dalam Proyek Pembangunan

Saldo Investasi dalam Proyek Pembangunan per 31 December 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Investasi dalam Proyek Pembangunan adalah sebagai berikut:

Investasi Dalam Obligasi

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Dana Bergulir Rp0

C.16 Dana Bergulir

Saldo Dana Bergulir per 31 December 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

Dana Bergulir

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Deposito Jangka Panjang Rp0

C.17 Deposito Jangka Panjang

Saldo Deposito Jangka Panjang per 31 December 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Deposito Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Deposito Jangka Panjang

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi Non Permanen Lainnya Rp0

C.18 Investasi Non Permanen Lainnya

Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 December 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Investasi Non Permanen Lainnya adalah sebagai berikut:

Investasi Non Permanen Lainnya

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi Jangka Panjang Permanen Rp0

C.19 Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 December 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang Permanen

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp0

C.20 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 December 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi Permanen Lainnya Rp0

C.21 Investasi Permanen Lainnya

Saldo Investasi Permanen Lainnya per 31 December 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut:

Investasi Permanen Lainnya

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Tanah Rp0

C.22 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2017 dan 2016 sebesar Rp0. atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA 2017. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang.

Saldo per 30 June 2017	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Saldo per 31 December 2017	Rp	-

Rincian Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas	Nilai	
1	-	-	Rp	-
2			Rp	-
Jumlah			Rp	-

Peralatan dan Mesin Rp4.844.675.702

C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 December 2017 dan 2016 adalah Rp0 dan Rp4.844.675.702.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 30 June 2017	**Rp**	**-**
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	1.458.622.450,00
- Mutasi Masuk dari OPD Lain	Rp	3.348.211.252,36
- Hibah	Rp	37.842.000,00
- reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
- penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 December 2017	**Rp**	**4.844.675.702,36**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2017	Rp	(1.278.511.025,00)
Nilai Buku Per 31 December 2017	**Rp**	**3.566.164.677,36**

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

a. Pembelian
b. Penerimaan

Mutasi tambah Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) sesuai dengan BAST Nomor : 800/010-BPPMD/2017 tetanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp2.008.563.695,36, Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan BAST Nomor : 028/157-PEM/2017 tertanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp198.996.081,00, Biro Umum BAST Nomor : 023/277-UMUM/2017 tertanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp698.694.676,00, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BAST Nomor : 024/20-BPKAD/2017 tertanggal 4 April 2017 sebesar Rp220.978.400,00, BAST Nomor : 024/031-BPKAD/2017 tertanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp220.978.400,00, serta Hibah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Naskah Hibah Nomor : NH-124/TORLIN/SET/KPP-PA/08/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 BAST Hibah Nomor : BAST-124/Torlin/KPP-PA/08/2017 sebesar Rp37.842.000,00. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Rp0

C.24 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 December 2017 dan 2016 adalah Rp0 dan Rp0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 June 2017	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Saldo per 31 December 2017	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2017		-
Nilai Buku Per 31 December 2017	Rp	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp Rp0

C.25 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 December 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada tahun 2017 terjadi mutasi tambah sebesar Rp0. Mutasi transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 June 2017	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Saldo per 31 December 2017	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2017		-
Nilai Buku Per 31 December 2017	Rp	-

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.26 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 December 2017 dan 2016 adalah Rp0 dan Rp0.

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2017. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo per 30 June 2017	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Saldo per 31 December 2017	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2017		-
Nilai Buku Per 31 December 2017	Rp	-

Rincian Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp0

C.27 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 December 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. .

Saldo per 30 June 2017	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Rehab Berat Ruang Kelas	Rp	-
Mutas kurang:		
- Gedung yang sudah selesai		
Saldo per 31 December 2017	Rp	-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Rp1.278.511.025

C.28 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 December 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar -Rp1.278.511.025 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 December 2017 disajikan pada Tabel 25, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.844.675.702	(1.278.511.025)	6.123.186.727
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		**4.844.675.702**	**(1.278.511.025)**	**6.123.186.727**

Aset Tak Berwujud Rp103.372.500

C.29 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud berupa Software per 31 December 2017 dan 2016 adalah Rp137.830.000 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, aset tak berwujud ini merupakan koreksi dari akun belanja barang dan jasa ke akun aset tak berwujud.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 June 2017	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
- koreksi pencatatan nilai	Rp	137.830.000
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Saldo per 31 December 2017	Rp	137.830.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2017		
Nilai Buku Per 31 December 2017	Rp	137.830.000

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 December 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai	
1	Software Aplikasi Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender	Rp	44.165.000
2	Software Aplikasi Peningkatan dan Pengembangan Layanan Masyarakat dalam Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Rp	49.500.000
3	Software Aplikasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana	Rp	44.165.000
Jumlah		**Rp**	**137.830.000**

Terdapat mutasi untuk aset tak berwujud ini dari akun belanja barang dan jasa ke akun aset tak berwujud tahun 2017

Aset Lain-Lain Rp0

C.30 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 December 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lain-lain merupakan barang milik daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) serta dalam proses penghapusan dari BMD.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 June 2017	Rp	-
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMD yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMD	Rp	-
Saldo per 31 December 2017	Rp	-
Akumulasi Penyusutan		
Nilai Buku per 31 December 2017	Rp	-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat disajikan sebagai berikut:

- Penambahan adalah dari reklasifikasi ...yang sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi senilai ...
- Penghapusan ...berupa ...senilai ...

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp34.457.500

C.31 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 December 2017 adalah Rp34.457.500.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 December 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan		Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi		Nilai Buku	
Aset Tak Berwujud	Rp	103.372.500	Rp	34.457.500	Rp	137.830.000
Aset Lain-lain	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Jumlah	Rp	103.372.500	Rp	34.457.500	Rp	137.830.000

Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2017

Utang Perhitungan Pihak Ketiga Rp0

C.32 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 December 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Utang Bunga Rp0

C.33 Utang Bunga

Nilai Utang Bunga per 31 December 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
Adapun rincian Utang Bunga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Bunga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp0

C.34 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 December 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Adapun rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	

3		Rp -	
Total		Rp -	

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.35 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 December 2017 dan 2016 sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Utang Beban Rp0

C.36 Utang Beban

Saldo Utang Beban per 31 December 2017 dan 2016 sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Beban disajikan sebagai berikut:

Rincian Utang Beban

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.37 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 December 2017 dan 2016 sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai berikut:

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Utang Dalam Negeri Rp0

C.38 Utang Dalam Negeri

Saldo Utang Dalam Negeri per 31 December 2017 dan 2016 sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Dalam Negeri sebagai berikut:

Rincian Utang Dalam Negeri

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Utang Jangka Panjang Lainnya Rp0

C.39 Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 December 2017 dan 2016 sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut:

Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		**Rp -**	

Ekuitas Rp3.724.485.177

C.40 Ekuitas

Ekuitas per 31 December 2017 dan 2016 sebesar Rp3.724.485.177,36 dan Rp0,00.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Rincian Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Belanja Modal	Rp 1.458.622.450,00	Rp -
2	Jumlah Aset Lancar	Rp 20.490.500,00	Rp -
2	Ekuitas	Rp 1.178.493.476,00	Rp -
3	Koreksi Ekuitas	Rp 1.066.878.751,36	Rp -
Total		**Rp 3.724.485.177,36**	**Rp -**

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional - LO Rp37.842.000

D.1 Pendapatan Operasional - LO

Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 December 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp37.842.000 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Operasional - LO Tahun 2017 dan 2016

URAIAN	Tahun 2017	Tahun 2016	Naik (Turun) %
Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -	0,00
Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 37.842.000	Rp -	100,00
Jumlah	**Rp 37.842.000**	**Rp -**	**100,00**

Pendapatan Operasional yang diperoleh dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari pendapatan hibah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Naskah Hibah Nomor NH-124/TORLIN/SET/KPP-PA/08/2017 tertanggal Delapan bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas dan Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor BAST-124/Torlin/KPP-PA/08/2017 tertanggal Tujuh bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas.

Beban Pegawai Rp11.042.999.816

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp11.042.999.816 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2016

URAIAN	Tahun 2017	Tahun 2016	Naik (Turun) %
Beban Gaji	Rp 2.967.092.900	Rp -	100,00
Beban Tunjangan-Tunjangan	Rp 878.274.310	Rp -	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	Rp 7.197.632.606	Rp -	100,00
Beban Lembur	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah	**Rp 11.042.999.816**	**Rp -**	**100,00**

Beban Persediaan Rp187.179.500

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp187.179.500 dan Rp0.

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2017	Tahun 2016	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp 133.259.500	Rp -	100,00
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	Rp 15.338.000	Rp -	100,00
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Rp 3.486.000	Rp -	100,00
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp 27.581.500	Rp -	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp 7.514.500	Rp -	100,00
Beban Persediaan Barang Cetakan		Rp -	0,00
Jumlah Beban Persediaan	**Rp 187.179.500**	**Rp -**	**100,00**

Beban Jasa Rp5.308.899.500

D.4 Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp5.308.899.500 dan Rp0.

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Tahun 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2017	Tahun 2016	Naik (Turun) %
Beban Jasa Konsultasi Perencanaan	Rp 44.600.000	Rp -	100,00
Beban Jasa Konsultasi Manajemen	Rp 93.200.000	Rp -	100,00
Beban Jasa Konsultasi Software Aplikasi	Rp 275.630.000	Rp -	100,00
Beban Uang Saku	Rp 1.976.850.000	Rp -	100,00
Beban Makan Tambahan (Extra Fooding)	Rp 12.000.000	Rp -	100,00
Beban Jasa Kesenian Tradisional	Rp 10.000.000	Rp -	100,00
Beban Jasa Kesenian Modern	Rp 6.500.000	Rp -	100,00
Beban Jasa Narasumber/Instruktur	Rp 2.475.500.000	Rp -	100,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	Rp 227.700.000	Rp -	100,00
Beban Jasa Tenaga Kerja Lapangan	Rp 162.800.000	Rp -	100,00
Beban Jasa Internet	Rp 24.119.500	Rp -	100,00
Jumlah	**Rp 5.308.899.500**	**Rp -**	**100,00**

Beban Pemeliharaan Rp192.610.890

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp192.610.890 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2017	Tahun 2016	Naik (Turun) %
Beban Penggantian Suku Cadang	Rp 98.589.090	Rp -	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer	Rp 5.250.000	Rp -	100,00
Beban Pemeliharaan Mebeulair	Rp 800.000	Rp -	100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	Rp 18.303.800	Rp -	100,00
Beban Jasa Service	Rp 30.330.000	Rp -	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp 19.488.000	Rp -	100,00
Beban Barang Non Kapitalisasi	Rp 19.850.000	Rp -	100,00
Jumlah	**Rp 192.610.890**	**Rp -**	**100,00**

Beban Perjalanan Dinas Rp192.610.890

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp1.122.753.064 dan Rp0.

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2017	Tahun 2016	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 386.863.000	Rp -	100,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 735.890.064	Rp -	100,00
Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah	**Rp 1.122.753.064**	**Rp -**	**100,00**

Beban Bunga Rp0

D.7 Beban Bunga

Beban Bunga Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bunga Tahun 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2017	Tahun 2016	Naik (Turun) %
	Rp -	Rp -	0,00
	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah	**Rp -**	**Rp -**	**0,00**

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2017	Tahun 2016	Naik (Turun) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	Rp -	Rp -	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	Rp -	Rp -	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah	**Rp -**	**Rp -**	**0,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 dan 2016 dapat dirinci sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 dan 2016

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahun 2017	Tahun 2016	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	0,00

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah Penyusutan	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**	**0,00**
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Penyusutan aset lain-lain	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah Amortisasi	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**	**0,00**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**	**0,00**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 dapat dirinci sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2017		Tahun 2016		Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**	**0,00**

Beban Lain-lain Rp0

D.11 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Penyisihan Piutang atas Beban Lain-lain untuk Tahun 2017 dan 2016 dapat dirinci sebagai berikut :

Rincian Beban Lain-lain Tahun 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2017		Tahun 2016		Naik (Turun) %
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	Rp	-	Rp	-	0,00

Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah Penyusutan	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**	**0,00**

Kegaiatan Non Operasional Rp0

D.12 Kegaiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dna fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegaiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016

URAIAN	Tahun 2017		Tahun 2016		Naik (Turun) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp	-	Rp	-	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp	-	Rp	-	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	-	Rp	-	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp	-	Rp	-	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp	-	Rp	-	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	-	Rp	-	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegaitan Non Operasional	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**	**0,00**

Pos Luar Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2017 dan 2016

URAIAN	Tahun 2017		Tahun 2016		Naik (Turun) %
Pendapatan Luar Biasa	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Luar Biasa	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**	**0,00**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada per 31 December 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Surplus (Defisit) LO -Rp25.501.003.270

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 December 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar -Rp25.501.003.270 dan Rp0.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	Rp -
Suku Cadang	Rp -
Barang Persediaan Lainnya	Rp -
Jumlah	**Rp -**

Koreksi Aset Tetap Rp0

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

Koreksi Atas Beban Rp0

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	Rp -
Beban Jasa	Rp -
Jumlah	**Rp -**

Lain-lain Rp929.048.751

E.6 Lain-lain

Lain-lain merupakan pengakuan penyusutan Aset yang terjadi pada periode sebelumnya mutasi dari OPD lainnya. Lain-lain untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp929.048.751 dan Rp0.

Ekuitas Akhir Rp3.690.027.677

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 December 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.690.027.677 dan Rp0.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Kejadian penting setelah tanggal Neraca tidak ada permasalahan yang mendasar pada saat penyusunan laporan akhir tahun ini.

F.2 INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

Untuk informasi tambahan dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Untuk sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak bisa digambarkan perbandingan perolehan anggaran maupun realisasi tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dikarenakan OPD baru.

b. Perlu kami informasikan bahwa dalam menatausahakan tata kelola keuangan terhadap rekapitulasi register per 31 Desember T.A. 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui pencatatan yang dilakukan Satuan PPK dan Satuan Bendahara Pengeluaran telah menerbitkan berbagai Berkas dokumen SPP dan SPM/SP2D sebesar Rp. 35.640 Milyar dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai SP2D
- SPP/SPM/SP2D UP sebesar	300.000.000
- SPP/SPM/SP2D TU sebesar	8.216.550.557
- SPP/SPM/SP2D GU sebesar	1.383.772.943
- SPP/SPM/SP2D LS sebesar	17.992.326.656
- SPP/SPM/SP2D Nihil sebesar	7.747.681.121
Total Nilai SP2D	**35.640.331.277**
Jumlah Nilai Belanja SP2D	**27.123.780.720**
Pengembalian Belanja	**2.450.000**
Total Nilai Belanja	**27.121.330.720**
Jumlah SP2D UP , TU	**8.516.550.557**

Dapat kami jelaskan Total Realisasi Belanja baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung di rinci pada tabel berikut ini ;

LAPORAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.064.600.000,00	2.967.092.900,00	96,82
2	Belanja Tunjangan Keluarga	335.702.718,00	264.276.254,00	78,72
3	Belanja Tunjangan Jabatan	248.882.821,54	234.670.000,00	94,29
4	Belanja Tunjangan Umum	125.375.780,46	107.895.000,00	86,06
5	Belanja Tunjangan Beras	256.331.200,00	171.128.460,00	66,76
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	2.970.576,00	21,22
7	Belanja Pembulatan Gaji	107.480,00	39.017,00	36,30
8	Belanja Iuran BPJS Kesehatan	124.000.000,00	85.928.725,00	69,30
9	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	25.000.000,00	11.366.278,00	45,47
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.271.800.000,00	7.181.132.606,00	98,75
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	19.200.000,00	16.500.000,00	85,94
	Jumlah	**11.485.000.000,00**	**11.042.999.816,00**	**96,152**

LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	50.650.000	48.150.000	95,06
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	524.550.000	416.315.000	79,37
	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur			
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.694.203.800	1.458.622.450	86,09
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	248.077.000	197.512.890	79,62
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.117.725.000	1.083.616.500	96,95
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	53.800.000	52.400.000	97,40
7	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	799.500.000	799.500.000	100,00
	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
8	Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender	744.773.000	725.228.000	97,38
9	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	2.108.960.000	2.015.791.000	95,58
10	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga	3.561.729.800	3.107.380.300	87,24
11	Penguatan dan Pengembangan Layanan Perlindungan Perempuan	1.238.865.000	1.199.880.000	96,85
12	Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	1.209.050.000	1.111.549.000	91,94
13	Peningkatan dan Pengembangan Layanan Masyarakat dalam Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan	842.850.000	838.125.000	99,44
	Kependudukan dan Keluarga Berencana			
14	Perencanaan Pengendalian dan Analisis Dampak Kependudukan	335.710.000	324.310.000	96,60
15	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.	81.563.000	81.268.000	99,64
16	Penyusunan dan Pengelolaan Data, Informasi Kependudukan Sebagai Basis Perencanaan Pembangunan	146.884.000	73.051.000	49,73
17	Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana	350.000.000	339.270.000	96,93
18	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan KB	303.393.200	285.273.200	94,03
19	Pembinaan dan Pengelolaan Pelayanan Kesertaan ber-KB	411.000.000	399.011.500	97,08
20	Pelayanan Administrasi dan Kependudukan (DAK)	356.665.300	224.263.664	62,88
21	Penataan Administrasi Pencatatan Sipil (DAK)	463.246.000	178.916.500	38,62
22	Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK)	503.104.700	337.647.400	67,11
	Penyediaan Data Pembangunan Daerah			
23	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	855.750.000	781.249.500	91,29
	Jumlah	**18.002.049.800**	**16.078.330.904**	**89,31**

c. Penertiban Pegawai antara lain :

Dapat diinformasikan bahwa pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana semuanya sebanyak 61 orang PNS dan Tenaga Honorer/P3K sebanyak 26 dimana semuanya merupakan pindahan dari dinas dan badan lainnya, hal ini disebabkan Dinas ini baru dibentuk.

d. Organisasi

Salah satu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten berdasarkan :

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.12-HUK/2017 tanggal 27 Januari 2017 serta Keputusan Gubernur Nomor 903/Kep.87-Huk/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Serta Nama Rekening Bank dan Nomor Rekening Bank Bendahara Penerima/Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 antara lain sebagai berikut :

   1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/atasan langsung bendahara, dan berwenang menandatangi SPM dan mengesahkan SPJ adalah :

      Nama : **Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si**

      NIP : 19681012 198803 2 003
      Jabatan : Kepala DP3AKKB Provinsi Banten

   2) Bendahara Pengeluaran
      Nama : **Abdul Aziz, A.Md**
      NIP : 19871102 201001 1 001
      Jabatan : Bendahara Pengeluaran DP3AKKB Provinsi Banten

2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 034.05/Kep.101-Huk/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengguna dan Pengurus Barang Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Maret 2017 antara lain sebagai berikut :

   1) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang BPPMD
      Nama : **Inova Handayani, S.STP**
      NIP : 19821022 200112 2 002

   2) Pejabat Pengurus Barang BPPMD
      Nama : **Yulianti, S.Ag,M.Si**
      NIP : 19760702 200112 2 001

3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 045.05/Kep. 315-Huk/2017 tentang Penetapan Pengelola Arsip Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 tanggal 4 Agustus 2017 antara lain sebagai berikut:

   1] Nama : **Rini Mulyani, SE**
   NIP : 19800924 200112 2 004

   2] Nama : **Dian Utami Indriany**
   NIP : 19810924 201410 2 002

4. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Nomor 902/036-DP3AKKB/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 antara lain sebagai berikut :

   1) Nama : **Raden Anietha Septhiana, SS,M.Si**
   NIP : 19710912 200112 2 004

   2] Nama : **Henny Halimah, SE**
   NIP : 19780510 200701 2 012

5. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Nomor 902/035-DP3AKKB/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penetapan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 antara lain sebagai berikut :

   1] Nama : **Hari Yandrianto, S.Sos**
   NIP : 19760122 200112 1 003

   2] Nama : **Rini Mulyani, SE**
   NIP : 19800924 200112 2 004

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB)

Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang
Serang

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 03 January 2017

Kepala,

Dra. Hj. SITTI MA'ANI NINA, M.Si
NIP. 19681012 198803 2 003